

AKSI KOLEKTIF DI DUNIA DIGITAL: #ALLEYESONPAPUA DAN PERJUANGAN MASYARAKAT ADAT SUKU AWYU DAN MOI ATAS HUTAN ADAT

Faisal Ramadhanas

Universitas Indonesia

Email Korespondensi: faisalramadhanas@gmail.com

ABSTRACT

On May 27, 2024, the indigenous Awyu and Moi sued the Supreme Court for the cancellation of an oil palm company's operational license, demanding the return of their exploited customary lands. This study analyzes the formation of collective action through social media to support the struggle for customary land rights, focusing on the use of the hashtag #AllEyesOnPapua as a mass mobilization tool and symbol of public solidarity. Through a collective action theory approach, this research explores the narratives on social media that create collective consciousness and trigger widespread public engagement. The results of the study are expected to show how social media opens up new spaces for solidarity actions in supporting the struggle of indigenous peoples against the exploitation of natural resources, while emphasizing the role of digital media in social advocacy.

Keywords: Collective Action, Social Media, #AllEyesOnPapua, Mass Mobilization.

ABSTRAK

Pada 27 Mei 2024, masyarakat adat suku Awyu dan Moi menggugat pembatalan izin operasional perusahaan kelapa sawit ke Mahkamah Agung, menuntut pengembalian tanah adat mereka yang dieksloitasi. Penelitian ini menganalisis pembentukan aksi kolektif melalui media sosial untuk mendukung perjuangan hak atas tanah adat tersebut, dengan fokus pada penggunaan tagar #AllEyesOnPapua sebagai alat mobilisasi massa dan simbol solidaritas publik. Melalui pendekatan teori aksi kolektif, penelitian ini mengeksplorasi narasi di media sosial yang menciptakan kesadaran kolektif dan memicu keterlibatan publik secara luas. Hasil penelitian diharapkan menunjukkan bagaimana media sosial membuka ruang baru untuk aksi solidaritas dalam mendukung perjuangan masyarakat adat melawan eksloitasi sumber daya alam, sekaligus mempertegas peran media digital dalam advokasi sosial.

Kata Kunci: Aksi Kolektif, Media Sosial, #AllEyesOnPapua, Mobilisasi Massa.

PENDAHULUAN

Dalam dekade terakhir, konflik terkait penguasaan tanah adat semakin meningkat, terutama di kawasan yang kaya sumber daya alam seperti Papua. Hal ini menjadi perhatian global terkait keberlanjutan lingkungan dan hak asasi manusia. Lembaga nasional hingga internasional ikut menyoroti apa yang terjadi di Papua. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menegaskan komisi kebenaran penting dibentuk untuk melanjutkan dialog yang direkomendasikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk membicarakan berbagai persoalan di tanah Papua (Wardah, 2019). Setelah dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukan keamanan terhadap warga sipil di Papua, filsuf dan profesor Institut Teknologi Massachusetts (MIT) Noam Chomsky dan sejumlah akademisi internasional lainnya meminta pemerintah Indonesia untuk menarik tentara dari provinsi tersebut. Grup yang disebut International Academics for West Papua menyatakan bahwa sejak 1969, tentara Indonesia telah menembak massa demonstrasi damai, membakar desa, dan menyiksa aktivis sipil dan penduduk lokal (Sofyan, 2017).

Pemerintah Indonesia tidak mempedulikan dengan keadaan Papua meskipun telah mendapatkan sorotan dan desakan dari berbagai pihak. Konflik yang sebelumnya belum terselesaikan, justru muncul kembali konflik baru. Para pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu dan Moi dari Papua mendatangi

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 2 Desember 2024

gedung Mahkamah Agung di Jakarta pada 27 Mei 2024. Di depan Mahkamah Agung, kedua suku melakukan upacara dan doa. Sekarang, masyarakat adat Awyu dan Moi menghadapi masalah pembabatan hutan di daerah mereka. Di sekitar tempat tinggal mereka, banyak perkebunan kelapa sawit. Pada 22 November 2021, PT Indo Asiana Lestari menerima persetujuan teknis dari pemerintah Provinsi Papua untuk memenuhi baku mutu emisi udara dari perkebunan sawit di kawasan hutan adat seluas 36.094 hektar di Distrik Fovi, Kabupaten Boven Digoel (Sanjaya, 2024).

Berangkat dari dasar ini, suku Awyu dan Moi bersama dengan perwakilan organisasi masyarakat sipil menggelar aksi di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, pada akhir Mei 2024. Mereka meminta MA untuk membuat keputusan undang-undang yang membatalkan izin perusahaan sawit yang mereka lawan. Jika izin perusahaan sawit ini dibatalkan, hak-hak masyarakat adat akan dipulihkan, dan hutan Papua akan diselamatkan.

Perjuangan suku Awyu dan Moi mendapat perhatian publik, salah satunya adalah munculnya tagar #AllEyesOnPapua yang menjadi viral di media sosial Instagram tidak lama setelah munculnya tagar AllEyes on Rafah. Acara yang mengandung tagar ini telah menarik perhatian dan menarik empati banyak orang. Tagar #AllEyesOnPapua menjadi viral di media sosial Instagram sejak 6 Juni 2024, setelah perjuangan suku Awyu dan Moi untuk mendapatkan kembali tanah adat mereka yang telah dirampas. Aktivitas yang mengandung tagar tersebut telah menarik banyak orang, dan masyarakat luas telah mendukungnya dan berempati dengannya.

Suku Awyu dan Moi bukan menjadi korban pertama akibat sengketa tanah di Papua. Penelitian-penelitian yang sudah ada menunjukkan bahwa sudah ada pembahasan tentang konflik-konflik di Papua. Hermawan (2019) menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua, di mana lembaga-lembaga hukum negara tidak melakukan penyelidikan yang memadai terhadap dugaan pelanggaran. Respon pemerintah cenderung menggunakan pendekatan kekuatan, yang menyebabkan banyak warga Nduga, terutama perempuan dan anak-anak, mengungsi demi keselamatan. Studi lainnya menemukan bahwa ketimpangan antar kabupaten dan kota di Provinsi Papua meningkat dari 2018 hingga 2021. Dengan kriteria ketimpangan yang tinggi, rata-rata nilai Indeks Williamson Provinsi Papua sebesar 0,585256472 (atau 0,59). Selain itu, untuk mengklasifikasikan kabupaten/kota di Provinsi Papua berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita, kami menggunakan alat analisis Tipologi Klassen periode 2018-2021. Pendekatan kewilayahan digunakan untuk membagi empat klasifikasi saat ini (Wenda, 2022).

Dengan menggunakan tagar #AllEyesOnPapua di media sosial, Kafiar dan Supatman (2024) menganalisis dan mengkategorikan perasaan netizen tentang masalah pembabatan hutan adat di Papua. Data dikumpulkan antara 25 Mei dan 20 Juni 2024 melalui crawling Twitter; 1270 tweet dikumpulkan, yang kemudian disaring menjadi 1149 setelah proses preprocessing.

Crawling data, preprocessing untuk membersihkan dan menyiapkan data, labeling sentimen menggunakan Library Vader Lexicon, dan pengklasifikasian menggunakan algoritma Support Vector Machine (SVM) adalah beberapa langkah dalam proses penelitian. Untuk mengevaluasi kinerjanya, model SVM dilatih dengan data yang telah diproses dan diuji dengan data uji.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model SVM memiliki akurasi sebesar 67%, dengan akurasi untuk sentimen positif sebesar 73%, precision untuk recall sebesar 64%, dan f1-score sebesar 68%. Hasil ini menunjukkan bahwa model cukup efektif dalam mengidentifikasi sentimen positif dibandingkan dengan sentimen negatif dan netral. Penelitian ini tidak hanya memberikan informasi berharga tentang pendapat publik tentang masalah lingkungan dan hak-hak masyarakat adat Papua, tetapi juga menunjukkan potensi teknik analisis sentimen berbasis teks untuk memahami dinamika sosial yang terjadi di media sosial.

Meskipun beberapa penelitian telah membahas permasalahan di Papua dan pembahasan tentang tagar *All Eyes on Papua*, masih sedikit yang menganalisis bagaimana melalui tagar tersebut dapat menggambarkan sebuah aksi kolektif di media sosial. Tagar All Eyes on Papua menunjukkan munculnya tren baru di kalangan pengguna media sosial tentang cara masyarakat menangani masalah. Apakah masyarakat dapat menegosiasikan kembali kebiasaan, menentang kesenjangan, menuntut hak-hak mereka, dan memperluas akses mereka dengan dukungan kolektif ini? Tindakan individu dengan tujuan, terutama ketika digabungkan, menjadi kolektif. Media sosial menjadi tempat baru di mana

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

52

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 2 Desember 2024

berbagai individu bertindak dan mendukung satu sama lain dengan cara yang sangat emosional. "Ruang baru" dan "aturan baru" adalah ide-ide paling penting dalam pemikiran setelah tirani (Kesby, 2005). Cronwall menegaskan hal ini untuk menghidupkan kembali kewarganegaraan dan hak-haknya (Hickey & Mohan, 2007).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tagar #AllEyesOnPapua sebagai perwujudan sebuah aksi kolektif dan memobilisasi dukungan politik terhadap perjuangan masyarakat adat di Papua. Aksi kolektif dipahami sebagai sesuatu yang sangat terkait dan terdiri dari praktik sehari-hari dan tindakan yang bertujuan; itu tidak hanya terbatas pada partisipasi publik yang disengaja dalam pengambilan keputusan dan tindakan kolektif, tetapi juga termasuk praktik rutin dan tindakan yang bertujuan (Cleaver, 2007). Tulisan ini akan memulainya dengan mengenal kehidupan Suku Awyu dan Moi, lalu perjungan dalam merebut kembali hak terhadap tanah adat, dan terakhit menunjukkan Gerakan All Eyes on Papua di media sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi etnografi yang berfokus pada pengamatan langsung dan partisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari subjek penelitian. Dalam konteks ini, etnografi tidak hanya melibatkan observasi pasif, tetapi juga keterlibatan langsung peneliti dalam interaksi sosial dan budaya yang terjadi dalam kehidupan subjek penelitian. Dalam dunia yang semakin digital, metodologi ini beradaptasi untuk memahami bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dengan teknologi dan media digital dalam konteks sosial mereka. Peneliti yang menerapkan etnografi digital tidak hanya mengamati, tetapi juga berpartisipasi dalam komunitas online untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai cara-cara teknologi membentuk interaksi sosial, pembentukan identitas, dan pembagian makna dalam ruang maya (Coleman, 2010).

Penerapan etnografi digital mengharuskan peneliti untuk mengumpulkan berbagai jenis data yang mencerminkan aktivitas dan interaksi pengguna di dunia digital. Data yang dikumpulkan bisa berupa teks, gambar, video, serta interaksi yang terjadi di platform digital seperti media sosial, forum online, dan aplikasi lainnya. Peneliti dapat menganalisis berbagai bentuk konten yang dihasilkan oleh pengguna, termasuk komentar, postingan, tweet, dan video yang dipublikasikan. Selain itu, interaksi yang terjadi dalam komunitas digital, seperti percakapan antar anggota, diskusi, serta kolaborasi, juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan untuk memahami bagaimana individu dan kelompok membangun hubungan dan makna dalam lingkungan digital.

PEMBAHASAN

Kehidupan Suku Awyu dan Moi: Keterikatan dengan Tanah Adat di Papua

Salah satu dari ratusan suku yang tinggal di Papua, suku Awyu dan Moi telah lama mengenal kehidupan mereka yang bergantung pada tanah dan hutan adat. Menurut buku Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia oleh Dr. Zulyani Hidayah (2015), suku Awyu tinggal di pesisir selatan Papua. Lebih tepatnya, mereka tinggal di daerah aliran Sungai Digul, yang terletak di sebelah barat tanah merah. Mereka sangat bergantung pada ekosistem lokal untuk kelangsungan hidup mereka, yang membentuk sistem sosial dan pikiran mereka serta memenuhi kebutuhan fisik mereka. Hubungan mereka dengan tanah adat memungkinkan mereka untuk menjaga hubungan dengan leluhur mereka dan mempertahankan kelangsungan hidup material.

Tanah adat Masyarakat Awyu dan Moi sangat erat kaitannya dengan kehidupan mereka karena tanah ini merupakan pusat kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual mereka selain tempat tinggal. Bagi mereka, tanah adalah entitas yang hidup yang tidak hanya menyediakan sumber daya alam tetapi juga membentuk identitas dan keberlanjutan budaya mereka, dan hubungan ini melampaui konsep pemanfaatan sumber daya alam semata. Ini karena tanah dianggap sebagai bagian dari sistem kehidupan.

Kehidupan masyarakat Awyu dan Moi bergantung pada hutan, yang merupakan bagian penting dari tanah adat mereka. Mereka bergantung pada hutan untuk berbagai hal, seperti makanan, obat, dan bahan bangunan. Selain itu, hutan memberikan tempat untuk metode pertanian tradisional yang berkelanjutan, seperti menanam padi dan umbi-umbian dengan cara yang tidak merusak ekosistem. Selain itu, bagi mereka, hutan adat juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 2 Desember 2024

ekologis di daerah tersebut, karena mereka mengelola sumber daya alam sesuai dengan prinsip keberlanjutan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut mereka, perusakan hutan atau eksploitasi berlebihan dapat mengganggu keseimbangan ekologi dan sosial, yang pada gilirannya akan mengganggu kelangsungan hidup masyarakat adat itu sendiri (Greenpeace, 2024; Putri, 2024).

Tanah adat memiliki makna simbolis yang signifikan bagi masyarakat Awyu dan Moi. Selain berfungsi sebagai sumber daya alam, hutan dan tanah juga merupakan tempat sakral yang terkait dengan kepercayaan dan ritual tradisional. Dalam sistem kosmologi mereka, setiap pohon, sungai, dan batu memiliki arti spiritual. Masyarakat Awyu dan Moi percaya bahwa tanah adalah milik bersama yang diwariskan oleh nenek moyang mereka dan harus dijaga untuk generasi berikutnya (Fundrika, 2024). Oleh karena itu, setiap upaya untuk mengubah atau memberikan pengelolaan tanah adat kepada pihak eksternal, seperti perusahaan perkebunan atau industri besar, dianggap sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup masyarakat adat karena mereka memiliki hubungan erat dengan tanah mereka.

Namun, tanah adat mereka menghadapi bahaya yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Kecepatan pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Papua telah menyebabkan banyak hutan dikonversi menjadi lahan komersial, mengancam ekosistem hutan adat yang dulunya sangat penting bagi kehidupan mereka. Aktivitas ekonomi yang tidak ramah lingkungan ini juga merusak tanah, menghilangkan keanekaragaman hayati, dan menurunkan sumber daya alam yang bergantung pada hutan (Fundrika, 2024).

Masyarakat Awyu dan Moi memiliki hubungan yang kuat dengan tanah adat mereka. Ini menunjukkan sistem kehidupan yang terintegrasi secara ekologis dan sosial yang bergantung pada sumber daya alam dan mempertahankan nilai-nilai budaya yang diwariskan. Bagi mereka, tanah adalah tempat yang menghidupi sekaligus memberikan makna yang lebih dalam, yang melampaui batas-batas materialisme. Oleh karena itu, setiap ancaman terhadap tanah adat mereka merupakan ancaman terhadap sistem hidup mereka yang telah dibangun selama berabad-abad. Sebagai masyarakat adat, mereka percaya bahwa kelangsungan hidup mereka bergantung pada kelangsungan tanah adat mereka, yang harus dijaga dan dilindungi dari perusakan dari luar.

Perjuangan Suku Awyu dan Moi dalam merebut kembali Hak terhadap Tanah Adat

"Saya menghidupi sembilan anak sendirian sejak suami saya meninggal tahun 2004. Hingga sekarang anak-anak sudah ada yang menjadi prajurit TNI, ada yang berkuliah di Jawa, ada yang sekarang masih bersekolah. Itu karena hasil hutan. Kami hanya berharap dari alam. Kami tidak bisa melakukan apa pun tanpa alam yang lestari."

- Antonia Noyagi

Greenpeace Indonesia (2024) melalui kanal website merilis kutipan ucapan dari Antonia dan Aji menjadi perwakilan suku Awyu yang terdampak dari sengketa tanah. Pemerintah berusaha melakukan berbagai cara dan upaya dalam menghegemoni seluruh isi negara, termasuk dalam hal ini tanah. Akan tetapi, Gramsci melihat hegemoni sebagai sebuah proses dinamis yang dapat berubah dan berubah sepanjang waktu. Hegemoni tidak hanya menunjukkan kekuatan kelas penguasa, ideologi yang kuat, dan kemampuan untuk menyatukan berbagai kelompok masyarakat. Hegemoni adalah tentang konflik budaya dan ideologis yang terus-menerus. Suatu ideologi dominan mungkin tampak kuat dan populer, tetapi ia masih dapat berubah. Ini menunjukkan bahwa keunggulan kelompok tidak pernah benar-benar selesai. Selalu ada kemungkinan bahwa kelompok yang terpinggirkan dapat mengambil dan mengubah ideologi yang dominan dengan yang lebih menguntungkan mereka (Bates, 1975).

Mereka terus berjuang untuk mempertahankan tanah adat, masyarakat Awyu dan Moi menunjukkan bahwa hegemoni pemerintah tidak tetap dan dapat berubah. Suku Awyu, yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Digul di selatan Papua, lebih tepatnya di Kabupaten Merauke, telah mempertahankan hak atas tanah adat mereka sejak lama. Sumber utama kehidupan mereka adalah hutan di daerah mereka, yang menyediakan hasil bumi, obat-obatan, dan kayu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sejak tahun 2000-an, wilayah hutan ini mulai digusur untuk membuka perkebunan kelapa sawit, didorong oleh pemerintah dan perusahaan perkebunan besar. PT. Nabire Baru adalah salah satu perusahaan yang terlibat dalam masalah ini karena mendapatkan izin untuk membuka lahan di daerah yang dimiliki oleh masyarakat adat Suku Awyu (Tempo, 2024). Perusahaan-perusahaan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX

indonesia OneSearch

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 2 Desember 2024

ini sangat memengaruhi kehidupan sosial dan ekosistem Awyu. Mata pencarian mereka langsung terancam karena hutan adat yang telah mereka lindungi selama ini mulai terancam hancur.

Hendrikus Woro, seorang pejuang lingkungan hidup yang berasal dari suku Awyu, menggugat Pemerintah Provinsi Papua karena memberikan izin lingkungan kepada PT Indo Asiana Lestari (IAL). PT IAL memiliki izin untuk mengelola lahan seluas 36.094 hektar di hutan adat milik marga Woro, yang merupakan setengah dari luas wilayah DKI Jakarta. Pengadilan tingkat pertama dan banding, bagaimanapun, menolak gugatan Hendrikus. Saat ini, satu-satunya cara untuk mempertahankan hutan adat yang telah menjadi warisan turun-temurun dari marga Woro adalah dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mempertahankannya.

Selain kasus kasasi terkait PT IAL, beberapa masyarakat adat Awyu juga sedang mengajukan kasasi terhadap PT Kartika Cipta Pratama dan PT Megakarya Jaya Raya, dua perusahaan sawit yang telah atau akan melakukan ekspansi di Boven Digoel. PT KCP dan PT MJR, setelah kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, mengajukan banding dan berhasil memenangkan kasus tersebut di Pengadilan Tinggi PTUN Jakarta. "Kami telah menderita cukup lama karena rencana perkebunan kelapa sawit di wilayah adat kami. Kami ingin membesarakan anak-anak kami dengan menggunakan sumber daya alam. Perkebunan kelapa sawit akan merusak hutan kami, dan kami menolaknya," ungkap Rikarda Maa, seorang perempuan adat Awyu.

PT Sorong Agro Sawitindo (SAS), yang berencana membabat 18.160 hektar hutan adat Moi Sigin untuk perkebunan kelapa sawit, adalah pihak lain yang berurusan dengan Suku Moi Sigin dalam proses hukum. PT SAS sebelumnya memiliki lahan seluas 40 ribu hektar di Kabupaten Sorong. Pemerintah pusat mencabut izin pelepasan kawasan hutan PT SAS pada tahun 2022 dan izin usaha juga dicabut. PT SAS, bagaimanapun, menolak keputusan tersebut dan menggugat pemerintah ke PTUN Jakarta. Masyarakat adat Moi Sigin melawan dengan mengajukan gugatan intervensi di PTUN Jakarta pada Desember 2023. Masyarakat adat Moi Sigin mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 3 Mei 2024 setelah gugatan tersebut ditolak oleh hakim pada awal Januari.

Perwakilan masyarakat adat Moi Sigin dalam gugatan intervensi, Fiktor Klafiu, menyatakan bahwa mereka meminta Mahkamah Agung untuk memberikan keadilan kepada masyarakat adat. Menurutnya, hutan adat adalah tempat mereka berburu dan meramu sagu, serta apotek dan tempat mereka mendapatkan semua yang mereka butuhkan. Mereka percaya bahwa kehadiran PT SAS menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat suku Moi. Mereka khawatir jika hutan adat mereka hilang, kemana lagi mereka akan tinggal dan mendapatkan semua kebutuhan hidup mereka.

Pihak berwenang pada saat itu kurang memperhatikan perjuangan masyarakat Awyu dan Moi, dan suara mereka seringkali diabaikan. Dalam konteks ini, masyarakat adat menghadapi tantangan yang lebih besar untuk mempertahankan hak-hak mereka karena ada perbedaan kekuatan antara komunitas lokal dan perusahaan besar yang didukung oleh negara. Selain itu, status tanah adat semakin memburuk karena kurangnya pengakuan resmi. Dalam banyak kasus, negara lebih mengutamakan kepentingan industri besar daripada melindungi hak-hak dasar masyarakat adat yang telah hidup secara alami selama berabad-abad.

Beberapa organisasi internasional dan lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada hak asasi manusia dan lingkungan hidup mengamati perjuangan mereka. Meskipun lembaga-lembaga tersebut menanggapi, dukungan untuk perjuangan masyarakat Awyu dan Moi masih terbatas dan seringkali dihalangi oleh kekuatan ekonomi dan politik yang lebih kuat. Hal ini menyebabkan ketegangan terus menerus antara kepentingan pembangunan ekonomi yang didorong oleh industri dan hak masyarakat adat untuk mempertahankan eksistensi mereka di tanah yang telah mereka wariskan.

Situasi ini mulai berubah ketika lebih banyak orang luar, termasuk akademisi dan aktivis, memberikan sorotan terhadap konflik tersebut, yang akhirnya mencapai puncaknya dengan meluasnya penggunaan tagar #AllEyesOnPapua di media sosial. Tagar ini menjadi simbol global yang mengundang perhatian internasional terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat adat di Papua, dan khususnya terhadap perjuangan Suku Awyu dan Moi dalam mempertahankan hutan adat mereka. Melalui media sosial, suara mereka menjadi lebih terdengar dan mendapat dukungan luas dari masyarakat global. Namun, sebelum kemunculan tagar ini, perjuangan mereka lebih bersifat lokal dan sering kali terhambat oleh ketimpangan kekuasaan yang ada.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:

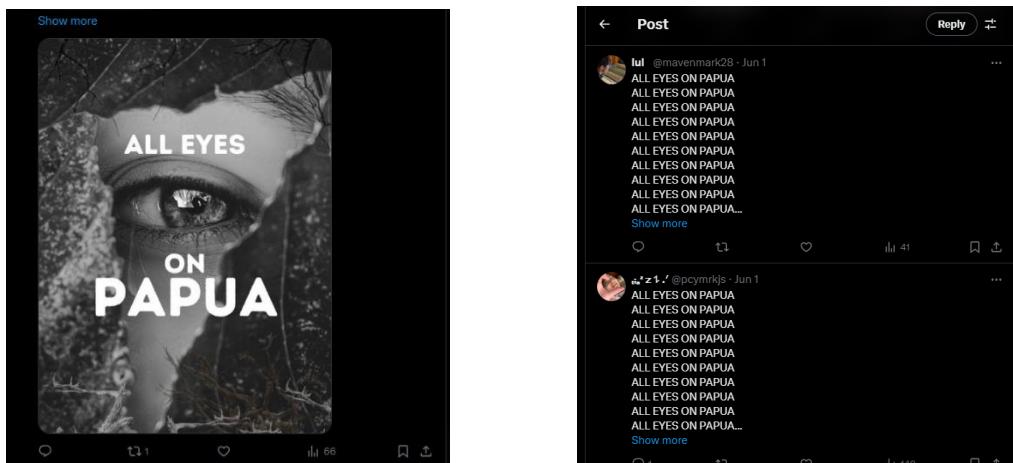


SINTA 5

PKP|INDEX

indonesia OneSearch

Aksi Kolektif melalui tagar All Eyes on Papua



Gambar I. 1. Tangkapan Layar gambar dan tagar All Eyes on Papua dari Aplikasi X

Seruan #AllEyesOnPapua menarik perhatian masyarakat umum. Kisah perjuangan suku Awyu dan Moi telah menarik banyak simpati masyarakat, terutama di Media Sosial, di tengah proyek pembangunan atau modernisasi yang sedang berlangsung di tanah mereka. Sejauh ini, tagar cerita #AllEyesOnPapua telah digunakan dan direpost oleh lebih dari 3,8 juta pengguna Instagram, yang menunjukkan bahwa tagar ini telah berhasil mendorong 3,8 juta pengguna Instagram untuk berpartisipasi dalam menyuarakan masalah ini. Selain itu, tagar ini telah digunakan dalam lebih dari 17 ribu postingan. Di aplikasi X, terhitung pada tanggal 1 Desember 2024 informasi tentang #AllEyesOnPapua dari akun Greenpeace Indonesia, sekarang with #AllEyesOnPapua, 5t3PeN sudah 20 ribu yang melakukan repost postingan tersebut.

Seruan untuk mendukung perjuangan masyarakat adat Papua tidak hanya disuarakan oleh aktivis dan lembaga non-pemerintah. Beberapa tokoh atau figur terkenal juga menyatakan simpati terhadap gerakan kepedulian ini, yang memiliki banyak pengikut di sosial media. Sebagai contoh, penyiar terkenal Daniel Mananta memposting tautan berita tentang perjuangan suku Awyu dan Moi yang sampai ke Jakarta untuk mendapatkan kembali hak atas tanah adat mereka. Banyak pengikutnya mendukung postingan tersebut, dan hampir 200 ribu orang merepostnya. Gerakan #AllEyesOnPapua telah menerima banyak dukungan dari masyarakat umum, dan telah berhasil melibatkan tokoh publik yang memiliki pengaruh besar terhadap media.

Seruan kepedulian terhadap perjuangan suku Awyu dan Moi dengan mudah menyebar dan menjangkau banyak orang berkat keterlibatan publik figur. Beberapa tokoh publik bahkan memposting postingan singkat seperti, "Untuk yang belum tahu, jadi hutan di Papua tepatnya di Boven Digul Papua, yang luasnya 36 ribu hektar, atau lebih dari separuh luas Jakarta, akan dibabat habis dan dibangun perkebunan sawit oleh PT Indo Asiana Lestari." Meskipun demikian, postingan sederhana ini dapat menerima banyak tanggapan dan mendapatkan simpati dari banyak orang. Peran figur publik dalam menyebarkan informasi tentang perjuangan suku Awyu dan Moi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Banyak orang dapat terpengaruh oleh pesan singkat dari publik figur tentang hak asasi manusia dan masalah lingkungan melalui media sosial.

Kafiar dan Supatman (2024) melakukan penelitian berfokus pada analisis sentimen netizen terhadap isu pembabatan hutan adat di Papua, yang diungkapkan melalui tagar #AllEyesOnPapua di media sosial. Dengan mengumpulkan data dari Twitter antara 25 Mei hingga 20 Juni 2024, peneliti berhasil mengumpulkan 1270 tweet. Setelah melalui proses preprocessing yang ketat, jumlah tweet yang relevan untuk analisis berkurang menjadi 1149. Proses ini meliputi penghapusan data duplikat, tokenisasi, normalisasi, dan penghapusan kata-kata yang tidak penting, sehingga data yang tersisa siap untuk dianalisis lebih lanjut.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 2 Desember 2024

Dalam penelitian mereka, algoritma Support Vector Machine (SVM) digunakan untuk mengklasifikasikan sentimen dari tweet yang telah diproses. Hasil analisis menunjukkan bahwa model SVM mampu mengidentifikasi sentimen netizen dengan akurasi sebesar 67%. Evaluasi lebih lanjut menunjukkan bahwa precision untuk sentimen positif mencapai 73%, sementara recall berada di angka 64%. Nilai f1-score yang diperoleh adalah 68%, yang mencerminkan keseimbangan antara precision dan recall dalam pengklasifikasian sentimen positif. Temuan ini menunjukkan bahwa model SVM cukup efektif dalam mengidentifikasi sentimen positif dibandingkan dengan sentimen negatif dan netral.

Mereka memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana masyarakat merespons isu lingkungan yang krusial, khususnya terkait hak-hak masyarakat adat di Papua. Dengan memahami opini publik yang terungkap melalui media sosial, penelitian ini dapat berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perlindungan lingkungan dan advokasi hak-hak masyarakat adat. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan potensi metode analisis sentimen berbasis teks dalam menggali dinamika sosial dan opini publik di era digital.

Jika Anda melihat kolom komentar pada postingan Instagram DI dan X tentang tagar #AllEyesOnPapua, Anda akan melihat berbagai perspektif dari anak muda yang mengikuti akun tersebut. Ada yang melihat masalah ini sebagai penjajahan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya, ada yang bersympati dengan perjuangan masyarakat adat yang rela meninggalkan Papua dengan biaya yang besar, dan ada juga yang menanggapi dengan mengadakan penggalangan dana untuk membantu perjuangan masyarakat adat.

Aksi kolektif ini juga didorong oleh perilaku agresif pengguna media sosial Indonesia terhadap masalah sensitif. Dalam beberapa waktu terakhir, pengguna media sosial di Indonesia, juga dikenal sebagai Netizen Indo, telah menjadi sangat aktif dalam aktivisme online. Dalam konteks Indonesia, "netizenship" berarti orang yang menggunakan internet secara aktif berpartisipasi dalam berbagai masalah sosial, politik, dan budaya melalui platform online seperti media sosial, forum diskusi, dan blog (Seto, 2017).

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah orang Indonesia yang menggunakan media sosial telah mencapai 139 juta. Netizen Indonesia sering menjadi pengawal masalah besar yang sering menindas pihak-pihak tertentu dan terkadang tidak dapat diselesaikan oleh negara, terutama oleh pihak-pihak penguasa yang bertanggung jawab, yang sering menjadikan netizen sebagai kelompok yang sangat agresif dalam melawan ketidak adilan. Sampai saat ini, istilah "Netizen harus turun tangan" telah menjadi sangat akrab dengan kita jika ada masalah tertentu yang kadang-kadang tidak mendapatkan perhatian yang cukup dan tidak mendapatkan keadilan. Saya percaya bahwa perilaku budaya netizen Indonesia yang sering berpartisipasi dalam aktivitas aktivisme di platform baru seperti media sosial adalah salah satu faktor yang mendorong dan mendorong aksi kolektif terhadap tagar #AlleyesOnPapua, yang dengan cepat menarik perhatian publik terhadap perlakuan dan penindasan yang mereka alami.

Dengan menggunakan tagar #AllEyesOnPapua, komunitas netizen berkolaborasi untuk memastikan bahwa informasi tentang kondisi Papua dapat tersebar luas dan menarik perhatian masyarakat luas. Ini menunjukkan bahwa kekuatan digital dapat digunakan untuk memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia. Tagar #AllEyesOnPapua menjadi begitu populer sehingga para pejabat yang selama ini diam-diam berbicara tentang masalah ini.

Pengaruh Media Sosial dalam Pembentukan Wacana

Gerakan #AllEyesOnPapua menunjukkan bagaimana media sosial memainkan peran penting dalam menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di Papua, terutama berkaitan dengan perjuangan suku Awyu dan Moi untuk hak tanah adat mereka. Jumlah besar dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk tokoh publik yang memiliki pengaruh besar di media sosial, menunjukkan kekuatan yang dapat ditimbulkan oleh penggerakan teknologi ini. Seruan #AllEyesOnPapua berhasil menarik perhatian publik yang lebih luas berkat keterlibatan orang terkenal, seperti Daniel Mananta, yang memposting tentang masalah ini. Selain itu, pesan yang dibagikan, meskipun terkadang sederhana, memiliki kemampuan untuk menarik simpati dan mendorong kesadaran kolektif masyarakat. Media

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 2 Desember 2024

sosial dalam kasus ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi tetapi juga menjadi tempat bagi masyarakat untuk berkolaborasi dengan masalah yang lebih besar.

Media sosial sebagai alat untuk mendorong aksi kolektif menunjukkan hubungan erat antara media dan kekuasaan, terutama dalam hal mobilisasi opini public (Long & Wall, 2013). Masyarakat dapat dengan mudah menggunakan tagar viral seperti #AllEyesOnPapua untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap undang-undang yang mengancam hak-hak masyarakat adat. Opini sosial yang lebih luas dipengaruhi oleh kehadiran tokoh publik yang menyatakan dukungan mereka untuk perjuangan ini. Sebaliknya, dampak yang dihasilkan oleh penggunaan media sosial tidak lepas dari dinamika kekuasaan yang lebih kompleks—pertarungan antara korporasi yang berusaha mengontrol sumber daya alam dan masyarakat adat yang berjuang untuk mempertahankan hak mereka. Media sosial berfungsi sebagai penghubung antara kedua kekuatan ini, dan masyarakat berfungsi sebagai agen yang memanfaatkan platform tersebut untuk menuntut keadilan.

Selain itu, peran netizen dalam menggerakkan masalah ini menunjukkan bagaimana orang di masyarakat dapat bekerja sama untuk menciptakan kesadaran sosial secara kolektif. Tanggapan yang berbeda dalam komentar di media sosial menunjukkan berbagai perspektif yang ada di masyarakat. Sementara orang lain menawarkan bantuan dalam bentuk penggalangan dana, orang lain menganggap masalah ini sebagai bentuk penjajahan modern. Ini menunjukkan bahwa media sosial, sebagai ruang publik digital, memberi setiap orang kesempatan untuk berpartisipasi dalam lebih banyak diskusi sosial. Fenomena ini juga menunjukkan bagaimana media sosial dapat digunakan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terpinggirkan sambil mempertimbangkan berbagai perspektif yang berbeda.

Gerakan #AllEyesOnPapua menunjukkan bahwa kekuatan media sosial dan peran netizen dalam menangani masalah sosial dan politik sangat terkait dengan kekuatan kekuasaan yang lebih besar. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai tempat perselisihan ideologi dan representasi. Media sosial memberikan platform bagi masyarakat adat Papua untuk memperjuangkan hak atas tanah mereka dengan melibatkan masyarakat umum. Dalam situasi ini, tagar #AllEyesOnPapua berfungsi sebagai representasi dari kemampuan digital untuk memperjuangkan keadilan dan juga merupakan representasi dari kekuatan kolektif yang menantang ketidakadilan yang dilakukan oleh kekuatan besar yang bertindak di luar ruang publik.

KESIMPULAN

Tanah adat Awyu dan Moi di Papua sangat erat dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual mereka karena sumber daya alamnya. Bagi kedua suku ini, tanah dan hutan adalah entitas hidup yang lebih dari sekedar materi; itu adalah bagian dari sistem hidup yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Mereka mempertahankan hutan sebagai ekosistem yang sehat dan tidak terganggu dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, dengan pertumbuhan industri, terutama perkebunan kelapa sawit, tanah adat mereka berada dalam bahaya. Masyarakat adat menganggap tanah mereka sebagai harta warisan yang harus dijaga untuk generasi mendatang, sehingga aktivitas ini merusak hutan.

Dunia telah menyaksikan perjuangan suku Awyu dan Moi untuk mempertahankan hak atas tanah adat mereka, terutama berkat gerakan #AllEyesOnPapua. Gerakan ini, yang berkembang pesat di media sosial, menunjukkan betapa pentingnya teknologi untuk menggerakkan opini publik dan mendukung perjuangan masyarakat adat. Dengan dukungan dari netizen dan tokoh publik, pelanggaran hak-hak masyarakat adat Papua, yang sering terpinggirkan oleh pemerintah dan korporasi, telah menjadi perdebatan internasional. Meskipun perjuangan mereka menghadapi hambatan hukum dan kekuatan ekonomi yang signifikan, media sosial telah berhasil menyuarakan ketidakadilan ini dan mendukung masyarakat adat dalam mempertahankan budaya dan lingkungan mereka.

REFERENSI

- Bates, T. R. (1975). Gramsci and the Theory of Hegemony. *Journal of the History of Ideas*, 36(2), 351–366.
- Cleaver, F. (2007). Understanding Agency in Collective Action. *Journal of Human Development*, 8(2), 223–244. <https://doi.org/10.1080/14649880701371067>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 2 Desember 2024

- Coleman, G. (2010). Ethnographic Approaches to Digital Media. *Annual Review of Anthropology*, 39, 487–505. <https://www.jstor.org/stable/25735124>
- Fundrika, B. A. (2024). *Mengenal Suku Awyu, Masyarakat Adat Papua yang Protes Hutan Mereka Diterobos Perusahaan Sawit*. Suara.Com. <https://www.suara.com/lifestyle/2024/06/04/151000/mengenal-suku-awyu-masyarakat-adat-papua-yang-protes-hutan-mereka-diterobos-perusahaan-sawit>
- Greenpeace. (2024). *Kisah Masyarakat Adat Awyu*. Greenpeace.Org. <https://www.greenpeace.org/indonesia/aksi/perjuangan-suku-awyu/>
- HERNAWAN, B. (2019). Papua. *The Contemporary Pacific*, 31(2), 536–544. <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/26784509>
- Hickey, S., & Mohan, G. (2007). *Participation: From Tyranny to Transformation: Exploring New Approaches to Participation in Development*. Zed Books.
- Hidayah, D. Z. (2015). *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kafiar, A. M., & Supatman. (2024). ANALISIS SENTIMEN NETIZEN TERHADAP ISU PEMBABATAN HUTAN ADAT PAPUA MELALUI TAGAR #ALLEYESONPAPUA MENGGUNAKAN ALGORITMA SUPPORT VECTOR MACHINE. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(4), 8129–8135.
- Kesby, M. (2005). Rethorizing empowerment-through-participation as a performance in space: Beyond tyranny to transformation. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 30(4), 2037–2065.
- Long, P., & Wall, Ti. (2013). *Media Studies Texts, Production, Context*. Routledge.
- Putri, D. L. (2024). *Mengenal Suku Awyu dan Moi, Sosok di Balik Seruan "All Eyes on Papua."* Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/04/170000165/mengenal-suku-awyu-dan-moi-sosok-di-balik-seruan-all-eyes-on-papua?-page=all>
- Sanjaya, Y. C. A. (2024). *Ramai Poster "All Eyes on Papua" di Media Sosial, Apa yang Terjadi?* Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/05/31/180000465/ramai-poster-all-eyes-on-papua-di-media-sosial-apa-yang-terjadi?-page=all>
- Seto, A. (2017). *Netizenship, Activism and Online Community Transformation in Indonesia*. Palgrave Macmillan Singapore.
- Sofyan, R. (2017). *Akademisi Internasional Minta TNI Ditarik dari Papua*. CNN INDONESIA. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171120134900-106-256864/akademisi-internasional-minta-tni-ditarik-dari-papua>
- Tempo. (2024). *Mengenal Suku Awyu dan Moi yang Dijuluki Si Penjaga Hutan Papua*. Tempo.Com. <https://www.tempo.co/hiburan/mengenal-suku-awyu-dan-moi-yang-dijuluki-si-penjaga-hutan-papua-51864>
- Wardah, F. (2019). *Amnesty International Desak Pembentukan Komisi Kebenaran di Papua*. Voaindonesia.Com. <https://www.voaindonesia.com/a/amnesty-international-desak-pembentukan-komisi-kebenaran-di-papua/4786963.html>
- Wenda, E. (2022). Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2018-2021 (Analysis of Development Inequality and Economic Growth Between Regions Regency/City in Papua Province 2018-2021). *Journal of Agribusiness and Rural Development (Jurnal Agribisnis Dan Pengembangan Pedesaan)*, 4(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.35791/agrirud.v4i3.44912>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

59

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX

Indonesia OneSearch